

PERKEMBANGAN DAN EKSISTENSI SURAT KABAR DI LOMBOK TIMUR TAHUN 1986-2013

Badarudin¹, Zulfikri², Abdul Rasyad³, Syahrul Amar⁴, Bambang Eka Saputra⁵

¹Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi
badarudin@hamzanwadi.ac.id¹, zulfikri2008@gmail.com², rasyad.iis@hamzanwadi.ac.id³,
syahrul_amar@ymail.com⁴, 2pakdebambangdhp@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dan eksistensi surat kabar yang ada di Lombok Timur tahun 1986-2013, mulai dari sejarah lahirnya surat kabar di Lombok Timur, perkembangan dan eksistensi surat kabar di Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan tahapan meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru surat kabar di Lombok Timur sulit terbit. Hal ini disebabkan karena biaya penerbitan surat kabar sangat mahal dan sulit. Pada masa pemerintahan Orde Baru, surat kabar di Lombok Timur belum bersifat komersil, hanya surat kabar yang terbit bulanan atau mingguan dan milik organisasi yang terbit pada saat itu, yang bertujuan untuk publikasi organisasi itu sendiri. Pada tahun 1986 baru terbit surat kabar Gema Nahdlatul Wathan. Setelah Reformasi Tahun 1998 berjalan, surat kabar mulai banyak bermunculan di Lombok Timur, dikarenakan untuk membuat izin mendirikan surat kabar dipermudah oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Surat kabar di Lombok Timur mengalami banyak kendala terutama permodalan, di samping karena kurangnya minat baca masyarakat Lombok Timur. Surat kabar di Lombok Timur sulit sekali bertahan lama, terutama surat kabar mingguan. Surat kabar yang masih eksis sampai tahun 2013 adalah surat kabar umum Corong Rakyat, Dewi Anjani, Duta Selaparang. Sedangkan surat kabar harian yang masih eksis hingga tahun 2013 adalah surat kabar Radar Lombok.

Kata Kunci: Existence, Perkembangan, Surat Kabar

Abstract

This study aims to explain the development and existence of newspapers in East Lombok in 1986-2013, starting from the history of the birth of newspapers in East Lombok, the development and existence of newspapers in East Lombok. This research is a historical research with stages including heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results showed that during the New Order era newspapers in East Lombok were difficult to publish. This is because the cost of publishing newspapers is very expensive and difficult. During the New Order government, newspapers in East Lombok were not commercial in nature, only newspapers published monthly or weekly and belonging to the organization that were published at that time, aimed at the organization's own publication. In 1986, the new Gema Nahdlatul Wathan newspaper was published. After the 1998 Reformation took place, many newspapers began to appear in East Lombok, due to the fact that obtaining a license to establish a newspaper was facilitated by the Press Law Number 40 of 1999. Newspapers in East Lombok experienced many obstacles, especially capital, in addition to a lack of interest in reading. East Lombok community. Newspapers in East Lombok are very difficult to last long, especially weekly newspapers. Newspapers that still exist until 2013 are the general newspaper Corong Rakyat, Dewi Anjani, Duta

Selaparang. Meanwhile, the daily newspaper that still existed until 2013 was the Radar Lombok newspaper.

Keywords: Development; Newspaper

A. Pendahuluan

Pada era Penjajahan Belanda tahun 1700 sampai 1900 di Indonesia, surat kabar yang pertama diterbitkan saat penjajahan Belanda yakni Kort Beiricht Eropa, Bataviase Nouvelles, Vendu Nieuws, dan Bataviasche Koloniale Courant. Surat kabar ini di tulis berbahasa Belanda dengan bentuk, dan tampilan yang sangat sederhana. Fungsi surat kabar saat itu mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa itu (Prasetiani dan Yohana, 2011).

Surat kabar milik Indonesia terbit pertama kali di Batavia tahun 1744. pers Indonesia tidak pernah lepas dari pengekangan oleh Penjajah Belanda, karena itulah kemudian muncul istilah “Pers Perjuangan” sebagai media untuk melawan Penjajahan. Mengetahui hal itu, Pemerintah Kolonial Belanda mengharuskan adanya surat izin atau sensor atas penerbitan pers di Batavia, Semarang dan Surabaya. Sejak itu pula, pendapat tentang kebebasan pers terbelah. Satu pihak menolak adanya surat izin terbit, sensor dan pembredelan, namun di pihak lain mengatakan bahwa kontrol terhadap pers perlu dilakukan (Martini, 2014).

Pada tahun 1910 berkembang surat kabar Medan Priyayi yang menjadi surat kabar harian sebagai pemerakarsa pers nasional, dialah yang pertama kali mendirikan penerbitan yang dimodali oleh nasional dan pemimpinnya orang Indonesia (Habibuddin, 2008: 3). Kemudian pada era Prakemerdekaan pada tahun 1900 sampai tahun 1945, seiring perkembangan zaman, mutu surat kabar semakin baik. Surat kabar era ini berkembang menjadi sarana menyampaikan saran, kritik, dan aspirasi, terutama bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Medan Prijaji adalah surat kabar pertama yang terbit dan dikelola oleh orang Indonesia. Surat

kabar berbahasa Indonesia dengan bahasan politik ini terbit pada Januari 1907. Pelopornya adalah Raden Mas Tirtohadisoerjo. Surat kabar tersebut di atas tidak bertahan lama, bangkrut karena modal kurang dan pembredelan oleh negara penjajah Belanda dan Jepang menjadi penyebabnya. Saat Jepang menguasai Indonesia tahun 1942, surat kabar yang terbit di Indonesia hanya satu yaitu Djawa Shimbun, kemudian ada beberapa surat kabar yang diizinkan terbit oleh Jepang, seperti Asia Raja, Tjahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia, tapi operasionalnya diawasi ketat oleh Jepang (Prasetiani dan Yohana, 2011).

Pada masa pergerakan Budi Utomo tahun 1908 surat kabar dikeluarkan orang Indonesia lebih banyak berfungsi sebagai alat perjuangan. Ada bebrapa surat kabar harian yang terbit pada masa itu diantaranya harian Sedio Tomo yang terbit di Yogyakarta tahun 1920, Harian Darmo Kondo yang terbit di Solo, harian Utusan Hindia terbit di Surabaya, Harian Fadjar Asia terbit di Jakarta (Budiyanto, 2007: 113).

Pada masa Pemerintahan Orde Lama di tahun 1950 sampai tahun 1965, surat kabar dipelopori partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa, surat kabar tumbuh dan menjamur. Tahun 1954 beredar 105 surat kabar harian, tetapi pada tahun 1959 jumlah surat kabar menurun menjadi hanya 94 surat kabar. Surat kabar yang besar pada masa itu adalah Harian Rakjat (Partai komunis indonesia), Pedomon (Partai Sarikat Islam), Suluh Indonesia (Partai Nasional Indonesia), dan Abadi oleh Partai Masumi (Prasetiani dan Yohana, 2011).

Pada masa Orde Lama surat kabar mengalami penekanan dari pemerintah, percetakan-percetakan surat kabar diambil alih oleh pemerintah dan para wartawan

diwajibkan untuk berjanji mendukung pemerintah (Budiyanto, 2007: 116).

Sedangkan pada masa pemerintahan era Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998, Orde Baru ditandai dengan dibubarkannya partai komunis Indonesia (PKI), dan naiknya Soeharto menjadi presiden Indonesia kedua. Surat kabar pro-PKI pun ditutup, surat kabar yang beredar hanya milik tentara, nasionalis, agama, dan kelompok independen yang diizinkan terbit diantaranya adalah surat kabar milik tentara diantaranya surat kabar Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, Ampera, Api Pancasila, dan Pelopor Baru. Surat kabar nasionalis diantaranya yaitu Suluh Marhaen, El Bahar, dan Warta Harian. Surat kabar islam diantaranya Duta Masyarakat, Angkatan Baru, Suara Islam, dan Mercusuar. Surat kabar kristen diantaranya Kompas dan Sinar Harapan (Prasetyani dan Yohana, 2011).

Sebelum peristiwa Malari, surat kabar diberi kebebasan menerbitkan surat kabar dan tidak diperlukan surat izin, akan tetapi setelah peristiwa malari pada tahun 1974 menyebabkan beberapa surat kabar di larang terbit. Tujuh surat kabar terkemuka di Jakarta (Termasuk Kompas) di larang terbit untuk beberapa waktu, baru setelah pemimpin redaksinya menandatangani surat pernyataan maaf barulah diizinkan kembali. Akan tetapi surat kabar pada masa itu dijadikan alat politik di atur dan tetap dikontrol (Budiyanto, 2007: 118).

Perkembangan surat kabar sejak era penjajahan Belanda sampai era berakhirnya Pemerintahan Orde Baru mengalami kemajuan, walaupun mendapat pengekan dari pemerintah, namun surat kabar tetap berkembang dan jumlahnya semakin bertambah walaupun jarang yang lama bertahan akan tetapi banyak juga yang bertahan lama.

Sejak masa Reformasi tahun 1998, pers nasional menikmati kebebasan. Hal demikian sejalan dengan alam Reformasi, keterbukaan dan demokrasi yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. Pemerintah pada masa Reformasi sangat

mempermudah izin penerbitan pers. Akibatnya, pada awal Reformasi banyak sekali penerbitan pers atau surat kabar baru bermunculan. Bisa dikatakan pada awal Reformasi kemunculan pers ibarat jamur dimusim hujan (Budiyanto, 2007: 120).

Pada awal pemerintahan di masa Reformasi bergulir, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dikeluarkan. Kelahiran Undang- Undang tersebut disambut gembira karena tercatat beberapa kemajuan penting dibanding dengan Undang-Undang sebelumnya (Budiyanto, 2007: 120).

Sedangkan ketika Pemerintahan Orde Baru berakhir dan digantikan dengan pemerintahan yang baru yaitu pada masa Pemerintahan Reformasi. Pemerintahan pada masa Reformasi telah membuka peluang lahirnya kebebasan pers. Setiap bulan lahir berpuluh-puluh penerbitan surat kabar dan media lainnya, dalam waktu satu tahun tercatat sekitar 1.700 penerbitan baru di Indonesia (Martini, 2014).

Efek dari era Reformasi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah membawa banyak perubahan. Pada zaman pemerintahan B.J. Habibie surat kabar berkembang pesat bahkan mencapai 5 ribu buah (Suprihatini dan Suparyanto, 2010: 30). Dari era Reformasi hingga saat ini banyak sekali penerbitan surat kabar baik surat kabar harian maupun mingguan. Di berbagai daerahpun banyak sekali penerbitan surat kabar, karena di daerah tertentu surat kabar sangat melekat di masyarakat. Seiring tibanya era Reformasi, terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan industri media massa, baik di pusat maupun di daerah. Hal yang paling mencolok adalah bermunculan industri media massa dengan idealisme dan kepentingannya masing-masing. Secara nasional terjadi “booming” industri media massa hingga mencapai 100% ditandai dengan munculnya berbagai surat kabar, tabloid, majalah, maupun bulletin baru

dengan kandungan bersifat lokalistik. Di Propinsi Nusa Tenggara Barat selain *Harian Lombok Post*, pada periode ini muncul tidak kurang 30 media baru sebagai kompetitor (Ariadi, 2001: 55).

Dari sekian banyak media massa atau surat kabar nasional maupun daerah ataupun lokal pada masa era Reformasi ini, ternyata yang mampu bertahan hanya 25% saja, selebihnya banyak yang terbit tidak teratur atau terbit hanya edisi perdana atau perkenalan karena berbagai kendala yang dihadapi (Ariadi, 2001: 56).

Perkembangan surat kabar di Nusa Tenggara Barat telah dirintis sejak tahun 1947, namun usaha tersebut perkembangannya sangat lamban. Sampai akhir tahun 1988 hanya satu surat kabar yang terbit di kota Mataram, itupun hanya mingguan yang pengelolaannya ditangani pihak swasta. Perkembangan surat kabar daerah inipun ternyata belum mendapatkan hasil (Ariadi, 2001: 55).

Perkembangan surat kabar di Nusa Tenggara Barat masih begitu sedikit dan tidak bisa berkembang karena beberapa faktor. Ariadi (2001) menjelaskan di Nusa Tenggara Barat surat kabar yang mampu bertahan lama dan besar hanya surat kabar yang bermitra dengan pemerintah, baik Pemerintah Provinsi dan Daerah. Kebijakan pemerintah Nusa Tenggara Barat untuk bermitra usaha dalam industri media massa merupakan sebuah fenomena menarik mengingat kedua aktor (Pemerintah dan Swasta), jelas-jelas memiliki orientasi dan motivasi berbeda

Tidak dipungkiri kalau surat kabar di Lombok Timur juga sulit berkembang terutama surat kabar mingguan, karena menurut penjelasan Ariadi (2001: 55), bahwa diseluruh Nusa Tenggara Barat terutama di Pulau Lombok, surat kabar banyak menghadapi berbagai kendala dari tahun ketahun. Kendala itu berbeda dengan kendala yang dihadapi surat kabar pada masa Penjajahan hingga berhairnya masa Orde Baru. Di mana pada masa Penjajahan surat kabar mengalami tekanan dari penjajah, sedangkan setelah

kemerdekaan surat kabar mengalami penekanan dari pemerintah.

Menurut data dan sumber yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur, perkembangan surat kabar sangat sedikit tidak seperti daerah lain atau daerah jawa, surat kabar yang terbit sejak surat kabar pertama yang ada di Lombok Timur belum ada yang terbit harian, hanya terbit mingguan dan bulanan saja, sedikit sekali surat kabar yang bertahan lama. Surat kabar harian pertama hanya Radar Lombok yang masih eksis sampai saat ini, karena harian Radar Lombok merupakan anak perusahaan *lombok post group*, sehingga bisa bertahan sampai saat ini.

Dari sumber yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur, menunjukkan kalau surat kabar Lombok Timur mempunyai kendala untuk berkembang dan eksis, baik itu surat kabar harian maupun mingguan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan dan eksistensi surat kabar yang ada di Lombok Timur tahun 1986-2013? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengetahui sejarah lahirnya surat kabar di Lombok Timur, untuk menjelaskan perkembangan dan eksistensi surat kabar di Lombok Timur.

Beberapa kajian tentang pers di Nusa Tenggara Barat sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Ada pnelitian Hidayatullah (2018) tentang perilaku jurnalis dalam penyelenggaraan pers di Bima. Kemudian penelitian Soi (2010) tentang pers dalam pemberitaan konflik antarwarga suku Sasak (analisis framing tentang pemberitaan konflik antarwarga suku Sasak di Lombok Tengah dalam *SKH Lombok Post* Periode 26-30 September 2009 Dan Periode 02 Februari-30 Maret 2010). Ada juga buku yang ditulis Efendi (2020) berjudul perkembangan pers di Indonesia. Selanjutnya da penelitian Syahputra (2019) tentang pers dan pemerintah. Terakhir peenlitian Rizky

(2018) tentang pemberitaan pelaksanaan pemilihan Gubernur 2018 Nusa Tenggara Barat dalam media lokal surat kabar Suara NTB (analisis isi rubrik polhukam pada surat kabar Suara NTB).

Secara umum penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas tentang sejarah pers di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu dari sisi kajian dan ruang lingkup, penelitian ini memiliki keberbedaan dengan kajian-kajian dimaksud. Hal ini tentu memberikan gambaran bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pers dan eksistensinya di NTB khususnya di Lombok Timur.

Pers merupakan usaha percetakan atau penerbitan, usaha mengumpulkan dan menyiarkan berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Pers juga merupakan orang-orang yang bergerak dalam suatu penyiaran suatu berita (Suprihatini dan Suparyanto, 2010: 27). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers bahwa yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Budianto, 2007: 97).

Pers juga dapat dijelaskan sebagai usaha percetakan dan penerbitan, usaha pengumpulan dan penyiaran berita baik melalui media cetak maupun elektronik (Budianto, 2007: 97). Menurut Krisna Harahap pers merupakan sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi dan menentukan sikap terhadap kebijakan pemerintah, karenanya pers bukan alat kekuasaan pemerintah, sehingga pers harus bebas dari pengaruh dan

pengawasan pemerintah (Budianto, 2007: 99).

Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang peran pers yaitu, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Budianto, 2007: 120).

Peran pers secara umum adalah mengumpulkan dan penyebaran informasi, serta mempunyai misi ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, menegakkan keadilan, serta memberantas kebatilan. Selama melaksanakan tugasnya, pers berkaitan erat dengan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hidup mereka. Untuk itulah pers sebagai lembaga kemasyarakatan diuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat (Suprihatini dan Suparyanto, 2010: 28). Sedangkan menurut Jacob Oetama dalam konteks masyarakat di Indonesia pers mempunyai peranan khusus yaitu memperkuat dan mengkreafitkan konsensus-konsensus dasar nasional, pers juga perlu mengenali masalah-masalah sosial yang peka dalam masyarakatnya, selain itu pers perlu menggerakkan prakarsa masyarakat. pers perlu menyebarluaskan dan memperkuat rasa kemampuan masyarakat untuk mengubah nasibnya sendiri, dan yang terahir kekurangan dan kegagalan bukan untuk dilaporkan bukan untuk merusak dan membangunkan rasa pesimis, tetapi untuk koreksi dan membangkitkan kegairahanserta selalu melangkah maju (Budianto, 2007: 111).

Fungsi pers menurut Kusuma Hidayat yaitu, memberikan pendidikan, segala peristiwa yang dimuat pers bisa dijadikan teladan bagi masyarakat, kemudian fungsi berikutnya yaitu sebagai penghubung artinya melalui pers, lembaga-lembaga kemasyarakatan berusaha untuk menumbuhkan kontak antar manusia sehingga tercipta saling pengertian dan saling tukar pandangan bagi perkembangan kehidupan manusia, kemudian pers juga berfungsi sebagai pembentuk pendapat atau opini umum, yang terakhir pers berfungsi sebagai pembimbing serta pengawas terhadap masyarakat tentang tingkah laku yang benar dan salah (Budianto (2007: 110).

Surat kabar merupakan salah satu media massa dalam bidang pers yang diterbitkan untuk umum atau golongan yang membuat beraneka ragam berita, hiburan, pengetahuan, dan sebagainya (Amin, 2009: 255). Surat kabar adalah medium utama bagi orang memperoleh berita, disebagian besar kota, tidak ada sumber berita yang bisa menyamai keluasan dan kedalaman isi pemberitaan, ini memperkuat popularitas dan pengaruh koran atau surat kabar (Vivian, 2008). Surat kabar merupakan salah satu dari media komunikasi massa, yang mempunyai program penyajian yaitu terdiri dari beberapa penyajian, program penyajian yang dapat digolongkan berdasarkan maksud dan tujuannya (Amin, 2009: 255). Secara umum tentang surat kabar, karena surat kabar merupakan suatu penerbitan yang mempunyai ciri khas, ciri khas tersebut yaitu, 1) Publisitas, yaitu surat kabar diperuntukkan untuk umum karena berita, tajuk rencana, artikel, dan lain-lain harus mengangkat kepentingan umum; 2) Universalitas, sebagai ciri lain dari surat kabar, menunjukkan bahwa surat kabar harus memuat berbagai berita mengenai kejadian-kejadian di seluruh dunia tentang segala aspek kehidupan manusia; 3) Aktualitas, yaitu kecepatan menyampaikan laporan berita mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak atau para

pembaca; 4) Prioritas, yaitu suatu penerbitan disebut surat kabar jika terbitnya secara periodik dan teratur.

Peran surat kabar lokal sangat penting sekali, karena media lokal lebih memprioritaskan pembahasan atas topik-topik atau permasalahan di tingkat lokal, yang memang menjadi persoalan dan kebutuhan masyarakat setempat untuk segera dipecahkan. Bukan permasalahan-permasalahan di tingkat nasional yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat pembacanya di tingkat lokal (Djarmika, 2004: 24).

Fungsi surat kabar sangat penting di pemerintahan dan masyarakat. Fungsi surat kabar adalah menyiarkan informasi kepada masyarakat, memberikan sarana pendidikan pengetahuan. Selain itu surat kabar juga berfungsi sebagai hiburan, karena surat kabar sering memuat berita-berita yang menarik dan artikel berbobot, selain itu surat kabar berfungsi sebagai pemegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan juga mempengaruhi massa (Amin, 2009: 258).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dimana masalah dan pemecahannya dari perspektif historis (Abdurrahman, 2009: 43; Sjamsuddin, 2007)). Kegiatan pengumpulan data-data sejarah dilakukan melalui observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap perkembangan surat kabar di Lombok Timur, serta orang-orang yang terkait dalam penelitian, peneliti terjun langsung dan terlibat langsung dengan keseharian pengelola surat kabar, sehingga peneliti dapat mendengar, melihat dan merasakan pengalaman-pengalaman yang dialami obyek penelitian. Kemudian dilakukan wawancara dengan informan yang representatif dengan topik yang diteliti. Studi Dokumentasi diperoleh melalui data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan dengan penelitian,

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta data-data yang relevan dengan penelitian.

Kritik sumber kemudian dilakukan untuk menguji kebenaran data yang telah didapatkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya dilakukan penafisan atas fakta yang diperoleh dengan mensintesis beberapa fakta agar sesuai dengan teori yang digunakan. Tahap terakhir adalah historiografi dimana fakta-fakta yang bersifat fragmentaris disusun ke dalam tulisan yang sistematis, utuh, dan komunikatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Wilayah Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur pulau Lombok dengan letak astronomis antara 116°-117° Bujur Timur dan 8°-9° Lintang Selatan. Berdasarkan topografi wilayah Kabupaten Lombok Timur terletak pada ketinggian 0-3.726 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan hamparan dari utara ke selatan. Adapun batas wilayah kabupaten Lombok Timur yaitu, sebelah Barat dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, sebelah Timur dengan Selat Alas, sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km² terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km² (59,91 persen) dan lautan seluas 1.074,33 km² (40,09 persen). Luas daratan Kabupaten Lombok Timur mencakup 33,88 persen dari luas Pulau Lombok atau 7,97 persen dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2011 luas daratan Kabupaten Lombok Timur yang digunakan sebagai lahan sawah seluas 45.813 Ha (28,53 persen) dan lahan kering seluas 114.742 Ha (71,47 persen).

Perkembangan pemerintahan tingkat desa/kelurahan dalam beberapa tahun

terakhir cukup dinamis. Pada tahun 2010 jumlah Desa/kelurahan di Kabupaten Lombok Timur tercatat sebanyak 215 Desa/kelurahan sedangkan Desember 2011 jumlah Desa/kelurahan menjadi 252 atau mengalami penambahan sebanyak 37 Desa. Satuan pemerintahan dibawah desa yakni Dusun/lingkungan tercatat sekitar 1.271 pada akhir tahun 2011. Aikmel merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 24 desa, sedangkan Sembalun merupakan kecamatan dengan desa paling sedikit di Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2011 jumlah desa di kecamatan yang terletak di kaki gunung Rinjani ini hanya 6 Desa.

Jumlah pegawai pemerintah yang berada dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.885 orang, jumlah ini mengalami penurunan sekitar 0,31 persen jika dibanding keadaan tahun sebelumnya yang mencapai 12.925 orang. Penurunan tersebut disebabkan jumlah pegawai pensiun tidak berimbang dengan penerimaan pegawai baru.

Jumlah penduduk merupakan isu sentral dari pembangunan. Penambahan dan pengurangan penduduk berperan besar dalam menentukan strategi dan kebijakan pemerintah. Disamping itu dengan diketahuinya sebaran penduduk maka pembangunan akan berjalan tepat sasaran. Jumlah penduduk Lombok Timur tahun 2011 sekitar 1.116.745 jiwa, jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 1,01 persen jika dibandingkan jumlah penduduk tahun 2010. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, penduduk Lombok Timur tahun 2011 terdiri dari 519.898 laki-laki dan 596.847 perempuan, dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Lombok Timur sebesar 87,11 artinya terdapat 87 laki-laki setiap 100 penduduk perempuan.

Penduduk Lombok Timur tersebar di 20 Kecamatan. Tiga Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2011 adalah

Kecamatan Masbagik Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Pringgabaya, Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sembalun, Sambalia dan Kecamatan Sukamulia.

Potensi sumber daya manusia dikabupaten Lombok Timur didasarkan atas ketersediaan tenaga kerja serta keahlian yang dimiliki oleh rata-rata tenaga kerja yang belum tersalurkan dari masing-masing kecamatan yang ada sekitar 5-10% dengan rata-rata pendidikan terakhir SD-SMP dan banyak yang putus atau tidak sekolah. menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur (Sakernas 2009), persentase penduduk untuk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha seperti bidang pertanian (48,80%), di bidang industri pengolahan (13,46%), untuk usaha perdagangan sebesar 17,15%, untuk bidang jasa-jasa (8,71%), bidang konstruksi (2,80%), angkatan dan komunikasi (6,05%) dan lain-lainnya sebesar 3,03%.

Keahlian yang dimiliki adalah bidang pertanian, perdagangan dan jasa kerajinan. Dengan demikian untuk potensi SDM di Kabupaten Lombok Timur mayoritas mempunyai keahlian dibidang pertanian dan perdagangan serta ada yang memiliki keterampilan alami membuat kerajinan patung.

Dengan demikian dapat dikatakan masyarakat cenderung melakukan kegiatan bertani atau berusaha membuka suatu usaha kecil seperti pengrajin patung, anyaman bambu, tenun timbul dan upaya keahlian alami masyarakat; terutama di wilayah terisolasi/terpencil meskipun demikian dapat memberikan keuntungan bagi wilayah Lombok Timur.

Kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Lombok Timur masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai dalam periode 2005-2007. IPM Kabupaten Lombok Timur mencapai 59,60 pada tahun 2005 kemudian sebesar 60,30 pada tahun 2006 dan sebesar 60,91 pada tahun

2007 (Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat 2007). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat (2007) dalam periode 2005-2007; IPM Kabupaten Lombok Timur berada urutan kedua dari bawah (Peringkat 7) dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2004 posisi IPM Kabupaten Lombok Timur berada pada peringkat 428 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pada tahun 2005, IPM Kabupaten Lombok Timur turun peringkat menjadi 429 dan peringkat IPM Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2006 justru lebih terpuruk lagi; yaitu turun menjadi 441. Disisi lain, IPM rata-rata yang dicapai Kabupaten Lombok Timur dalam periode 2004-2006 sebesar 60,27 berada dibawah IPM rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 63,11 dalam periode yang sama.

Rendahnya pencapaian angka IPM ini juga ditunjukkan dengan rendahnya capaian beberapa indikator IPM yang meliputi Angka Melek Huruf (AMH), Angka Lama Sekolah (ALS) Penduduk Usia 15 tahun keatas, Angka Harapan Hidup (AHH), dan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP).

Pendidikan berperan penting dalam menopang kelangsungan hidup masyarakat, pemerintah dalam salah satu program kerjanya berusaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia sejak usia dini melalui pendidikan yang layak. Program Wajib Belajar mengharuskan penduduk usia sekolah 6-17 tahun dapat mengikuti pendidikan formal. Sekolah Dasar sampai SLTP. Bahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar tersebut, pemerintah mengalokasikan dana subsidi pendidikan yang semakin besar dari tahun ke tahun dari nilai total APBN.

Data dasar pendidikan ini menjadi salah satu tolak ukur dalam membuat perencanaan, kebijakan dan evaluasi melalui indikator pembangunan manusia, dimana salah satu alat ukurnya yaitu angka melek huruf dan rata-

rata lama sekolah. Salah satu indikator perkembangan.

Perguruan Tinggi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 diantaranya STKIP Hamzanwadi Selong, Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, Ma'ahad Darul Qur'an Wal Hadits (MDQH) Pancor, STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani, Institut Agama Islam NW Anjani, Ma'ahad Darul Qur'an Wal Hadits (MDQH) Anjani, STIA Muhammadiyah Selong, Universitas Gunung Rinjani Anjani.

Dalam periode 2003–2006 sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lombok Timur dengan kontribusi sebesar 40,95 % (2003), 40,95 % (2004), 40,25 % (2005) dan 38,95 % (2006). Meskipun kontribusi terbesar PDRB berasal dari sektor pertanian; namun sektor ini belum mendapat perhatian selama periode 2003–2006 yang ditunjukkan dengan menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam periode 2003–2006. Dalam pada itu, sektor lain yang memberikan kontribusi terhadap PDRB setelah sektor pertanian adalah perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 15,65 % (2003), 15,49 % (2004), 15,57 % (2005), 16,44 % (2006). Laju Pertumbuhan Ekonomi di Lombok Timur tahun 2012 adalah 5,40 %.

Sejarah Lahirnya Surat Kabar di Lombok Timur

Pada masa orde baru yaitu pada tahun 1986, keadaan surat kabar di Nusa Tenggara Barat tidak berkembang, tidak seperti daerah lain seperti, kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta. Di Nusa Tenggara Barat pada tahun itu masih merintis adanya surat kabar. Pada ahir Tahun 1998 surat kabar di Nusa Tenggara Barat perkembangannya sangat lamban, itupun hanya ada di kota Mataram. Pada tahun itu hanya ada satu surat kabar yang beredar dan hanya terbit mingguan, surat kabar itu dikelola oleh pihak swasta (Ariadi, 2001: 56).

Munculnya Surat kabar di Lombok Timur dimulai pada masa Orde Baru atau pada tahun 1986, surat kabar yang masuk pada saat itu adalah surat kabar nasional atau surat kabar yang sudah besar dan mapan serta beredar di seluruh Indonesia. Surat kabar yang masuk di Lombok timur pada saat itu ada yang terbit mingguan dan ada yang terbit harian, tapi surat kabar tersebut hanya beredar di lingkup perkantoran saja, dikarenakan masyarakat Lombok Timur pada masa Orde Baru tidak berminta membaca surat kabar.

Surat kabar harian yang datang dan beredar di Lombok Timur pertama adalah Bali Post pada tahun 1986. Bali Post merupakan surat kabar harian yang beredar di Lombok Timur. Kemudian diikuti surat kabar nasional lainnya seperti surat kabar Kompas, Tempo, Sinar Pembaharuan, serta surat kabar Nusa Tenggara Barat seperti Lombok Post. Surat kabar Lombok Timur belum ada yang berdiri dan beredar pada saat itu, karena sulitnya mendirikan surat kabar pada masa Orde Baru, di mana pada saat itu, untuk mendirikan surat kabar harus mengurus izin ke Menteri Penerangan atau yang disebut surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP).

Masuknya surat kabar dari luar daerah pada tahun 1986 sampai tahun 1998 tidak membuat surat kabar di Lombok Timur mulai berkembang, padatahn itu surat kabar Lombok Timur masih dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan serta organisasi islam untuk publikasi sendiri, tidak untuk usaha untuk mendatangkan keuntungan berupa uang.

Pada tahun 1986 surat kabar di Lombok Timur belum bersifat komersil, pada tahun itu terbit surat kabar Gema Nahdatul Wathan, yang merupakan surat kabar pertama di Lombok Timur. Surat ini merupakan cikal bakal berdirinya surat kabar lainnya, namun masih bersifat untuk publikasi organisasi tetapi karena jamaah NW sangat banyak peredaran surat kabar

ini semakin berkembang dan memotifasi pendirian surat kabar yang lainnya.

Dilatar belakang oleh pengurus besar Nahdatul Wathan (NW) yang ingin mempublikasikan program dan kegiatan keorganisasin dan da'wah kepada masyarakat khususnya warga Nahdatul Wathan (NW). Yang digagas oleh para pemuda, dosen serta tokoh Nahdatul Wathan (NW). Surat kabar ini terbit mingguan dan pelanggan atau pembaca terbanyaknya adalah warga Nahdatul Wathan (NW). Surat kabar ini hanya beredar di wilayah Lombok Timur saja. Gema Nahdatul Wathan hanya bertahan sekitar 3 tahun lalu hilang atau sudah tidak terbit sejak tahun 1989. Setelah Gema NW berhenti terbit pada tahun 1989, mulai diikuti surat kabar milik organisasi lainnya, hingga pemerintahan orde baru berakhir pada tahun.

Pada tahun 1991 surat kabar Mataram yang pertama masuk di Lombok Timur adalah Lombok Post, namun surat kabar ini hanya beredar di sekitar perkantoran Pemerintah Lombok Timur. Surat kabar nasional seperti Kompas dan Tempo juga sulit berkembang di Lombok Timur dalam jumlah pelanggan. Masyarakat Lombok Timur pada saat itu masih banyak buta huruf dan juga minat bacanyanya masih rendah. Surat Lombok Post juga memotifasi pendirian surat kabar di Lombok Timur.

Ketika masa orde baru berakhir pada tahun 1998, surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) dipermudah, mulai banyak bermunculan surat kabar di Lombok Timur namun masih terbit mingguan, bulanan. Diawali oleh surat kabar Sinar Lombok pada tahun 1998, kemudian diikuti surat kabar lainnya. Puncaknya pada tahun 2000 mulai banyak bermunculan surat kabar di Lombok Timur seperti Tabloid patuh karya, Geledak post dan terus bermunculan hingga tahun 2013.

Perkembangan Surat Kabar Pada Masa Orde Baru (1986-1998)

Pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1986, surat kabar di Lombok Timur belum bersifat komersil, hanya surat kabar yang terbit bulanan atau mingguan yang bersifat milik organisasi yang terbit pada saat itu, yang bertujuan untuk publikasi organisasi itu sendiri. Pada tahun 1986 baru terbit surat kabar Gema Nahdatul Wathan, yang merupakan surat kabar pertama di Lombok Timur, dilatar belakang oleh pengurus besar Nahdatul Wathan (NW) yang ingin mempublikasikan program dan kegiatan keorganisasin dan da'wah kepada masyarakat khususnya warga Nahdatul Wathan (NW). Yang digagas oleh para pemuda, dosen serta tokoh Nahdatul Wathan (NW). Surat kabar ini terbit mingguan dan pelanggan atau pembaca terbanyaknya adalah warga Nahdatul Wathan (NW). Surat kabar ini hanya beredar di wilayah Lombok Timur saja. Gema Nahdatul Wathan hanya bertahan sekitar 3 tahun lalu hilang atau sudah tidak terbit sejak tahun 1989.

Pada masa Orde Baru atau pada saat terbitnya gema NW hingga tahun 1998, surat kabar di Lombok Timur belum ada satupun yang mendirikan surat kabar, karena sulit mendirikan surat kabar pada masa itu, sulitnya mengurus surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) pada saat itu. Pada masa Orde Baru untuk mendapatkan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP), paling cepat sekitar 1 tahun dan dana sekitar 250 juta (Lalu Gita Ariadi, 2001:56). Karena untuk mengurus surat izin mendirikan surat kabar yang begitu sulit, sehingga surat kabar di Lombok Timur sulit berkembang pada saat itu.

Di Lombok Timur, hanya surat kabar nasional yang paling banyak beredar pada masa Orde Baru seperti surat kabar Bali Post, Kompas, Pelita. Pada masa Orde Baru, segala penerbitan media massa berada dalam pengawasan pemerintah yaitu melalui departemen penerangan. Bila ingin tetap beredar, maka surat kabar tersebut harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintahan Orde Baru. Pers seakan-akan dijadikan alat pemerintah

untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga pers tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya yaitu sebagai pendukung dan pembela masyarakat (Efendi, 2010).

Karena pemerintah pada masa Orde Baru ikut campur pada surat kabar sehingga surat kabar Lombok Timur belum ada yang berdiri atau belum bisa berkembang, karena sulitnya mengurus izin penerbitan. Sulit sekali surat kabar berkembang karena diawasi bahkan dikekang oleh pemerintah secara keseluruhan. Bentuk ikut campurnya adalah, pemerintah mengawasi surat kabar dalam pemberitaannya, bahkan pemerintah melalui departemen penerangan dimasing-masing daerah tidak segan-segan mencabut surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) pada surat kabar tersebut.

Perkembangan Surat Kabar Pada Masa Reformasi (1998-2013)

Dengan adanya kebebasan pers pada masa Reformasi tahun 1998, maka surat kabar di Lombok Timur mulai berkembang dan bermunculan, karena pada saat itu dengan pemerintah tidak mempersulit pengurusan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP), dipermudah dalam pengurusannya dan biayanya pembuatannya juga tidak dipersulit sebagaimana pada masa Orde Baru sangat sulit dan harus mempunyai modal yang banyak.

Pada tahun 1998 atau masa Reformasi, di mana Presiden BJ. Habibie yang menggantikan presiden Suharto pada saat itu, melalui Menteri Penerangan dibawah kabinet BJ. Habibi menghapus atau mencabut Peraturan Menteri Penerangan 01/Per/Menpen/1984 tentang ketentuan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP), yang menjadi alasan pemberedelan surat kabar oleh pemerintah (Ariadi, 2001: 56).

Dengan dikeluarkan surat keputusan Menteri Penerangan Nomor 132 Tahun 1998 yang memberi kemudahan memperoleh surat izin usaha penerbitan

pers (SIUPP), di mana pada masa Orde Baru untuk mendapatkan surat izin usaha penerbitan Pers (SIUPP) paling cepat sekitar 1 tahun dan dana sekitar 250 juta (Ariadi, 2001: 56). Sejak dikeluarkannya keputusan itu maka, surat kabar mulai menjamur dan bermunculan, dikarenakan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) dipermudah untuk mendapatkan perizinan mendirikan surat kabar. Bahkan di seluruh daerah di Indonesia hingga didaerah-daerah. Di daerah Lombok Timur juga ikut bermunculan surat kabar dan mulai mengalami perkembangan, namun karakteristiknya masih dalam bentuk mingguan, dari segi ukuran juga masih kecil dan juga masih hitam putih dan berukuran masih kecil. Sejak tahun 1998 perizinan untuk mendirikan surat kabar sangat mudah cukup dengan meminta izin dari departemen penerangan di masing-masing daerah, maka sudah bisa mendirikan surat kabar. Di mana pada masa Orde Baru harus mengurus izin ke pusat dan harus melalui persetujuan dari dewan pers.

Pada tahun 1999 atau sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid kemudian menghapuskan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) (Ri'aeni & Sulistiana 2017). Dengan dihapuskannya surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) maka perusahaan surat kabar semakin bebas mendirikan surat kabar asalkan punya badan hukum yang jelas atau punya perusahaan seperti CV. atau PT.

Sejak Reformasi bergulir, surat kabar selalu dihubungkan dengan demokrasi, yang mana demokrasi berarti kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Seiring tibanya era Reformasi, terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan industri surat kabar baik itu di pusat maupun di daerah (Lalu Gita Ariadi, 2001:56). Pada pemerintahan BJ. Habibi pers mengalami transisi kebebasan dan juga sudah mulai berkembang dengan perubahan pada Undang-Undang Pers yang

semakin memudahkan para pelaku pers atau penerbit surat kabar.

Dengan berakhirnya rezim Orde Baru, industri media masa baik itu di daerah maupun di pusat mengalami perubahan struktural yang signifikan sebagai akibat tuntutan reformasi, perubahan tersebut diawali deregulasi industri surat kabar yang dilakukan oleh menteri penerangan Yunus Jofiah dibawah kabinet BJ. Habibie, anatar lain pencabutan peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984 tentang ketentuan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP), yang dijadikan dasar pemberedelan media masa (Ariadi, 2001: 56).

Puncaknya adalah dikeluarkannya Undang- Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terdapat pasal di dalam Undang-Undang ini yang menyatakan pencabutan semua Undang- Undang Pers yang ada sebelumnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang memberatkan pers, akibatnya permintaan untuk izin penerbitan meningkat. Berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, fungsi pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial (Efendi, 2010).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menandai era baru kebebasan pers pasca Orde Baru, telah membawa banyak perubahan bagi dinamisasi kehidupan media di Indonesia. Salah satu indikator awal dari adanya kebebasan tersebut adalah meningkatnya jumlah penerbitan pers (Yusuf, 2014).

Setelah Reformasi berjalan pada tahun 1998 atau pemerintahan demokrasi berjalan, surat kabar mulai banyak bermunculan dikarenakan untuk membuat izin mendirikan surat kabar sudah tidak ada lagi, sehingga siapapun boleh mendirikan surat kabar yang penting mempunyai modal banyak. Bahkan surat kabar sangat penting untuk publikasi terutama pemerintah daerah yang sangat membutuhkan publikasi ke Desa-

desa mengenai program pemerintah atau publikasi lainnya.

Sejak tahun 1998 hingga tahun 2000 mulai bermunculan surat kabar di Lombok Timur, dengan terbitnya Sinar Lombok pada tahun 1998 setelah Reformasi bergulir, kemudian terbit tabloid patuh karya pada tahun 2000, tapi bertahan hingga tahun 2002. Kemudian terbit surat kabar Selong Post tahun 2001 tapi tidak bertahan lama, hanya terbit hingga 2002. Terbit juga surat kabar Geledok Post pada tahun 2000 hingga 2003.

Pada tahun 2002 terbit surat kabar Lensa Rakyat dan bertahan hingga 2008. surat kabar ini kritis dalam pemberitannya terutama dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Sejak awal pendiriannya hingga tahun 2005, surat kabar ini tetap eksis dikarenakan untuk pertama kalinya surat kabar mingguan dibaca keseluruh pelosok desa dengan kerjasama dengan pemerintah daerah melalui program koran masuk desa (KMD).

Berbeda dengan surat kabar mingguan lainnya, surat kabar ini tidak mempunyai kendala permodalan, karena iklan sertra kejasama yang banyak dengan pemerintah membuat surat kabar ini eksis hingga tahun 2005. Pada tahun 2004 surat kabar ini mendapat 2 penghargaan dari lembaga peduli doktor sutomo (LPDS) dan dewan pers. Penghargaan pertama diberikan pada surat kabar lensa rakyat yang mendapatkan juara dalam bidang peliputan pemilu legislatif tahun 2004 pada bulan mei, serta mendapatkan penghargaan juara 2 untuk kategori wartawan yang meliput tokoh calon legislatif. Surat kabar ini kemudian berhenti terbit pada tahun 2005 dikarenakan Sumber daya wartawan serta pengelola yang minim, di samping permodalan yang menurun akibat banyaknya persaingan surat kabar di Lombok Timur terutama surat kabar harian yang sudah mulai banyak masuk.

Kemudian pada tahun 2003 terbit Duta Selaparang, surat kabar ini terbit mingguan dan beredar di Lombok Timur,

surat kabar ini menyajikan berita seputar kegiatan dan kinerja dari Buopati Ali Bin Dahlan atau sosialisasi kegiatan pemerintah Lombok Timur, bahkan surat kabar ini berani menggaji para pegawai dan wartawannya.

Perkembangan surat kabar di Lombok Timur semakin mengalami perkembangan dan kemajuan, namun dari segi banyaknya surat kabar yang bermunculan. Sejak tahun 2004 perkembangan surat kabar di Lombok Timur semakin berkembang, dengan banyaknya surat kabar yang bermunculan, tetapi masih terbit mingguan. Surat kabar mingguan milik pemerintah Lombok Timur yang diterbitkan oleh BIKD yang bernama Koran Purnama pada tahun 2004, serta oleh Humas Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang bernama Gema Guni Selaparang yang keduanya bertahan sampai 2007 karena tidak adanya anggaran. Pemerintah membuat surat kabar untuk publikasi program kegiatan dari pemerintah daerah.

Pada tahun 2004 terbit surat kabar Rinjani Post tapi bertahan hingga tahun 2005, kemudian pada tahun 2005 hingga sekarang mulai banyak bermunculan media lokal atau berdiri dan beredar di Lombok Timur. Pada tahun 2006 muncul tabloid Dewi Anjani, surat kabar ini merupakan yang paling terlama beredar hingga kini. Surat kabar ini satu-satunya yang paling lama beredar, hingga kini kemudian pada tahun 2008, mulai bermunculan media seperti Puser, Corong Rakyat dan juga Tera Kota.

Surat kabar harian berdiri di Lombok Timur yaitu pada tahun 2009, dengan mulai berdiri dan terbitnya harian Radar Lombok di Lombok Timur. Radar Lombok. Munculnya Radar Lombok membuat surat kabar ini dibaca keseluruhan pelosok desa Lombok Timur, dengan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah Lombok Timur melalui program koran masuk desa (KMD) dari tahun 2010 hingga 2013. Kemudian diikuti surat kabar lainnya. Masyarakat terutama Kantor Desa dan semua Sekolah

diharuskan berlangganan Radar Lombok oleh pemerintah agar masyarakat gemar membaca dan tau perkembangan informasi khususnya di Lombok Timur.

Pada tahun 2014 ini mulai bermunculan surat kabar, ada juga surat kabar yang sudah tidak terbit dulunya muncul kembali seperti Duta Selaparang. Ada juga tera kota, Dewi Anjani masih tetap eksis beredar. Sedangkan surat kabar luar daerah Lombok Timur yang beredar di Lombok Timur seperti Suara NTB, Media Pembaharuan, Nurani Rakyat. Semua surat kabar itu mempunyai kerjasama dengan pemerintah daerah dan semua kantor yang berhubungan dengan pemerintah Lombok Timur berlangganan dan dibayarkan pemerintah daerah. Semua media lokal khususnya media Lombok Timur akan dirangkul oleh pemerintah daerah Lombok Timur.

Kendala Surat Kabar Lombok Timur

Walaupun sejak Reformasi bergulir tahun 1998, banyak surat kabar bermunculan, akan tetapi banyak yang hilang atau tidak terbit lagi, surat kabar di Lombok Timur tidak bisa bertahan lama. kendala utamanya adalah permodalan, pelanggan yang sedikit, karena masyarakat Lombok Timur juga tidak berminat terhadap surat kabar baik membaca ataupun berlangganan, perusahaan-perusahaan besar maupun kecil juga tidak mau memasukkan iklan, padahal pemasukan terbesar surat kabar adalah dari iklan. Tidak seperti di daerah lain, perusahaan sendiri yang memasukkan iklan, tetapi di Lombok Timur surat kabar sendiri yang mencari periklanan dan pelanggan.

Secara keseluruhan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini, surat kabar menghadapi berbagai kendala sehingga ikut memberikan implikasi buruknya potret surat kabar di daerah, selain itu surat kabar di daerah tidak mampu bertahan lama atau eksis, karena dihadapkan oleh berbagai kendala serta kalah bersaing dengan surat

kabar yang telah mapan atau harian serta surat kabar Nasional (Ariadi, 2001: 56).

Surat kabar di Lombok Timur masih mengalami banyak kendala terutama surat kabar mingguan, walaupun dengan munculnya surat kabar sangat banyak, tetapi tidak diiringi dengan kemajuan surat kabar itu sendiri baik dalam pendapatan ataupun dari segi yang lainnya. Periklanan merupakan salah satu kendala surat kabar di Lombok Timur, di mana Perusahaan besar jarang di Lombok Timur sehingga surat kabar sulit mendapatkan periklanan, mereka kalah bersaing dengan surat kabar harian, sehingga surat kabar mingguan hanya mendapatkan periklanan dalam skala kecil saja. Perusahaan-perusahaan besar juga tidak berminat memasukkan iklan pada surat kabar mingguan, padahal pendapatan terbesar surat kabar adalah dari periklanan. Surat kabar yang mempunyai iklan yang banyak akan bertahan lama karena pemasukkan dari iklan sangat banyak.

Surat kabar di Lombok Timur sulit bertahan lama karena mempunyai kendala dalam bidang permodalan, sejak Reformasi bergulir dan sejak surat kabar mulai berkembang di Lombok Timur, sejak itu pula surat kabar masih mempunyai banyak kendala. Menurut Lalu Gita Ariadi (2001: 57), beberapa kendala yang menghambat perkembangan surat kabar di Nusa Tenggara Barat selama ini meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia lokal yang memiliki kemampuan mengelola surat kabar daerah.
2. Keterbatasan sumber dan materi berita yang disajikan, keterbatasan perusahaan yang umumnya bermodal kecil dengan struktur perusahaan yang lemah.
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang belum kondusif, belum berkembangnya kegiatan perdagangan dan perindustrian di daerah sehingga kegiatan periklanan yang merupakan salah satu sumber pendapatan surat kabar belum mampu memberikan

kontribusi positif bagi perkembangan surat kabar di daerah.

4. Daya beli dan minat baca masyarakat di daerah masih rendah, kalah bersaing dengan surat kabar nasional atau surat kabar yang mapan

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala surat kabar di Lombok Timur sulit berkembang dan sulit eksis, diantara faktor utama kendala surat kabar di Lombok Timur sulit berkembang adalah:

- a. Permodalan yang kurang atau kecil, sehingga mengakibatkan surat kabar sulit berkembang dan bertahan lama. Surat kabar kesulitan membiayai percetakan, apalagi membiayai karyawan dan wartawan.
- b. Perusahaan-perusahaan besar maupun kecil yang membutuhkan promosi di surat kabar belum banyak, karena surat kabar bisa berkembang dan bertahan lama dengan banyaknya iklan-iklan perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan surat kabar tidak bisa mengandalkan jumlah pelanggan saja tapi jumlah periklanan yang sebanyak mungkin.
- c. Kesadaran dan minat baca terhadap surat kabar masih rendah di Lombok Timur terbukti hanya Perkantoran, Sekolah yang berlangganan surat kabar, hanya masyarakat perkotaan yang sebagian kecil berlangganan surat kabar secara pribadi.
- d. Selain itu surat kabar lokal mingguan di Lombok Timur kalah bersaing dengan surat kabar harian baik lokal maupun Nasional maupun surat kabar yang lingkupnya Nusa Tenggara barat seperti surat kabar Lombok Post, disamping banyaknya media elektronik dan media online lainnya.

Kendala yang lain setelah era digital dimulai sejak tahun 2000 serta perkembangan teknologi menuntut surat kabar untuk bertransformasi. Media internet dan televisi menjadi ancaman utama bagi industri surat kabar. Tantangan surat kabar dan usaha pers lainnya yaitu menggandeng pembaca muda untuk

mempertahankan regenerasi pembaca. (Kusuma, 2016)).

Kemampuan ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan dan akses terhadap media massa. Dalam konteks Indonesia, kemampuan ekonomi masyarakat tergolong masih sangat rendah sehingga menghambat perkembangan media cetak yang memang mensyaratkan pembacanya untuk membayar meskipun terdapat trend bahwa media-media semacam ini akan gratis). Pola pemenuhan daya beli untuk mengejar keuntungan surat kabar ekonomi ini membuat isi surat kabar di Indonesia lebih banyak berorientasi pada masyarakat perkotaan. Ini mengakibatkan pasar surat kabar untuk masyarakat miskin pedesaan tidak tergarap dengan baik sehingga kelompok ini selain tidak mempunyai cukup uang untuk membeli juga enggan mengkonsumsi media cetak (Yusuf, 2014).

Surat kabar yang masih eksis hingga sekarang ini seperti tabloid Dewi Anjani yang terbit sejak desember tahun 2006, surat kabar ini terbit mingguan hingga kini, surat kabar ini didirikan publikasi kegiatan organisasi Nahdatul Wathan (NW) Anjani, da'wah dan juga sosial. Adapun kendala yang dihadapi surat kabar ini adalah finansial atau permodalan sejak berdirinya hingga kini, namun Dewi Anjani tetap eksis dan terbit hingga kini walaupun terkadang jarang terbit. Surat kabar ini merupakan yang paling eksis di Lombok Timur dari surat kabar mingguan lainnya, selain itu kendalanya juga kurangnya tenaga yang kompeten dibidang pemasaran sehingga surat kabar hanya beredar di sekitar Lombok Timur dan juga Lombok Tengah saja. Awalnya beredar di Lombok Timur dan juga Lombok Barat, akan tetapi kurangnya tenaga sehingga hanya beredar di Lombok Tengah dan Lombok Timur hingga kini.

Berbeda dengan surat kabar mingguan Lombok Timur yang mempunyai banyak kendala terutama kendala permodalan. Lain halnya dengan surat kabar harian Radar Lombok, surat

kabar ini tetap eksis hingga kini, walaupun kerjasama dengan pemerintah Lombok Timur dihentikan sejak tahun 2013, namun tetap eksis dan berkembang hingga kini.

Surat kabar yang eksis kembali hingga sekarangpun masih mengalami kendala. Sejak didirikan tahun 2008 kendala utama surat kabar Tera Kota adalah permodalan, kurangnya iklan, sehingga sempat menghilang pada tahun 2010. Minat pelanggan juga masih kurang, di samping minimnya tenaga dan juga sumber daya manusia dibidang pengelolaan. Di samping juga manajemen yang masih tidak terarur.

Eksistensi Surat Kabar Lombok Timur

Sebelum era Reformasi atau pada masa pemerintahan Orde Baru, surat kabar di Lombok Timur belum ada yang terbit, karena sulitnya mengurus izin surat penerbitan usaha pers (SIUPP), sebagaimana dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Surat kabar di Lombok Timur pada saat itu hanya bersifat milik kelompok dan organisasi, itupun terbitnya lebih banyak bulanan dan tidak bertahan lama, hanya terbit 2 sampai 3 tahun saja, sehingga tidak ada yang eksis lama.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, surat kabar diawasi oleh pemerintah, sehingga Pembredelan, sensor dan perlunya surat izin terbit yang secara resmi dilarang Undang-Undang Pokok Pers (Pasal 4 dan 8 Ayat 2), dengan Permenpen 01/1984 Pasal 33H yang menghadirkan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP), melestarikan kekangan terhadap surat kabar, surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) merupakan lembaga yang menerbitkan pers dan pembredelan (Martini, 2014). Inilah yang membuat surat kabar di Lombok Timur sulit berdiri dan terbit, di samping itu juga sulit berkembang serta sulit eksis lama dalam penerbitan, karena kebebasan surat kabar mengalami penekanan dari pemerintah Orde Baru.

Pada masa Reformasi bergulir, surat kabar sulit bertahan lama, eksistensi surat kabar pada masa itu masih banyak mengalami kendala dan masih banyak yang

menghambatnya untuk berkembang, sehingga untuk bertahan lama sangat sulit terutama surat kabar lokal atau daerah. Pada masa Reformasi walaupun surat kabar banyak bermunculan, baik itu di daerah lain maupun di Lombok Timur, akan tetapi tidak diikuti dengan eksistensinya dalam penerbitan secara terus menerus, banyak surat kabar muncul, banyak juga yang tidak terbit lagi. Di Lombok Timur sedikit sekali surat kabar yang bertahan hingga tahun 2014, ada yang terbit 1 tahun, 3 tahun dan lalu menghilang.

Dari sekian banyak surat kabar mingguan yang kini terbit di daerah Lombok Timur, hanya sedikit yang bertahan lama, tidaklah mudah menerbitkan sebuah media cetak yang bisa bertahan lama, untuk bisa bertahan menghidupkan media tidak hanya diperlukan modal, namun dibutuhkan seorang yang punya idelisme untuk bisa bertahan menghadirkan media cetak secara terus menerus (Alfian, 2014).

Surat kabar di Lombok Timur sulit sekali berkembang dalam hal bertahan lama atau eksis, terutama surat kabar mingguan. Ada beberapa surat kabar mingguan yang masih eksis sampai bertahun-tahun hingga saat ini, di antara surat kabar itu adalah surat kabar umum Corong Rakyat, Dewi Anjani, Duta Selaparang. Sedangkan surat kabar harian yang masih eksis hingga saat ini atau hingga tahun 2014 ini adalah surat kabar Radar Lombok.

Surat kabar mingguan sulit sekali bertahan atau eksis bertahun-tahun dikarenakan berbagai faktor utamanya adalah permodalan dan yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Surat kabar mingguan sulit diterima di masyarakat dikarenakan kalah bersaing dengan surat kabar harian yang berasal dari luar Lombok Timur seperti Lombok Post, dan NTB Post. Selain itu sumber daya manusia (SDM) juga sangat mempengaruhi eksisnya surat kabar mingguan, jarang sekali pengelola dan wartawan yang benar-benar

mampu mengelola surat kabar dengan baik, mereka juga tidak paham mengenai sistem pengelolaan surat kabar yang baik dan benar, akibatnya berimbas pada kualitas berita yang tidak diminati pembaca. Surat kabar harian dan mingguan bisa eksis karena banyak pembaca atau pelanggan serta banyak iklan.

Selain itu surat kabar bisa bertahan lama dikarenakan banyak periklanan dan advertorial yang masuk dengan bayaran yang masuk, akan tetapi surat kabar mingguan sulit mendapatkan iklan dan advertorial dikarenakan peminat atau jumlah pembacanya sedikit, para pembaca atau konsumen lebih memilih surat kabar harian dikarenakan lebih banyak peminat dan pembacanya.

Pemasaran surat kabar mingguan lebih sulit dari surat kabar harian, dikarenakan kualitas berita kalah bersaing dengan surat kabar harian, di mana pembaca lebih senang berita terkini dan terabdet, sedangkan surat kabar harian tidak mempunyai wartawan yang benar-benar berkopeten di bidang surat kabar mingguan, sehingga mereka lebih mengikuti gaya dan cara surat kabar harian. Kesejahteraan pengelola dan wartawan surat kabar mingguan sangat memperhatikan dibandingkan surat kabar harian, di mana para karyawan tidak diberi gaji sedangkan surat kabar harian kesejahteraan para pegawai dan wartawan sangat baik.

Kerjasama dengan Pemerintah Lombok Timur sangat mempengaruhi eksistensi surat kabar, karena kerjasama yang panjang akan membuat surat kabar mempunyai pemasukan untuk biaya cetak. Dalam hal ini pemerintah Lombok Timur juga membutuhkan surat kabar untuk publikasi baik program kegiatan dan yang lainnya, pemerintah daerah juga berkeinginan untuk merangkul semua media serta mengawasi agar berita berimbang. Bentuk mitra surat kabar dengan Pemerintah Lombok Timur, yaitu 1) Berlangganan dan semua kantor diharuskan berlangganan termasuk kantor

di Kecamatan dan Desa serta Sekolah contohnya Duta Selaparang dan Tera Kota, selain itu pemerintah daerah mengharuskan berlangganan semua kantor yang berhubungan dengan pemerintah daerah Lombok Timur saja; 2) Memberikan iklan pada semua surat kabar yang bermitra pada momen-momen atau hari-hari besar tertentu; 3) Kaplingan berita satu kali seminggu.

Dari tahun 2001 hingga kini rata-rata surat kabar mingguan Lombok Timur hanya bertahan 2 sampai 3 tahun saja, baik itu surat kabar milik pemerintah maupun milik swasta, karena tidak memiliki modal yang banyak. Para pemilik surat kabar umumnya memiliki permodalan yang kecil serta sulit mengembangkan surat kabarnya, sehingga cepat hilang atau tidak terbit lagi.

Surat kabar Lombok Timur yang masih eksis sampai 2013 masih sedikit, itupun masih tertatih-tatih dalam penerbitan, dan mempunyai banyak kendala seperti yang dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Adapun surat kabar mingguan yang bertahan hingga kini adalah Dewi Anjani yang sejak 2005 hingga sekarang masih bertahan, Duta Selaparang sejak tahun 2004 yang sempat hilang tahun 2009 kemudian muncul lagi di tahun 2014, serta ada Tera Kota yang muncul kembali setelah tidak terbit lagi.

Berikut surat kabar mingguan di Lombok Timur yang tetap eksis terbit sampai tahun 2013.

a. Surat Kabar Dewi Anjani

Surat kabar Dewi Anjani merupakan surat kabar yang masih eksis hingga sekarang ini seperti Tabloid Dewi Anjani yang terbit sejak desember tahun 2006, Surat Kabar ini terbit mingguan hingga tahun 2013, Surat kabar ini didirikan publikasi kegiatan organisasi Nahdatul Wathan (NW) Anjani, da'wah dan juga sosial. Adapun kendala yang dihadapi surat kabar ini adalah finansial atau permodalan, sejak berdirinya hingga tahun 2013, namun Dewi Anjani tetap eksis dan

terbit hingga kini walaupun terkadang jarang terbit. Surat kabar ini merupakan yang paling eksis di Lombok Timur dari syarat kabar mingguan lainnya, selain itu kendalanya juga kurangnya tenaga yang kompeten di bidang pemasaran sehingga peredaran surat kabar hanya di sekitar Lombok Timur dan juga Lombok Tengah. Awalnya beredar di Lombok Timur dan juga Lombok Barat akan tetapi kurangnya tenaga, sehingga hanya beredar di Lombok Tengah dan Lombok Timur hingga kini.

Surat kabar Dewi Anjani bisa eksis hingga kini dikarenakan pengelolaan surat kabar ini berbeda dengan surat kabar mingguan lainnya, pengelola hanya berkomitmen dan tidak memaksakan kehendak seperti surat kabar lainnya yang memaksakan diri menerbitkan surat kabar berwarna yang membuat biaya percetakan mahal, surat kabar ini juga mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh surat kabar mingguan lainnya, karena dari segi penulisan berita sangat menarik untuk dibaca sehingga pelanggan berminat dan tetap eksis hingga sekarang.

Walaupun persaingan sangat ketat dengan surat kabar harian dari luar daerah akan tetapi Dewi Anjani berusaha mencari dana untuk bisa tetap eksis yaitu dengan bermitra dengan pemerintah sejak terbitnya, sehingga pemerintah daerah Lombok Timur membayar langganan untuk seluruh SKPD dan juga Desa maupun Lurah.

b. Duta Selaparang

Duta selaparang terbit perdana sejak tahun 2004, hingga kini tetap terbit, namun pada tahun 2008 berhenti beredar di Lombok Timur dan hanya beredar di Mataram dan wilayah Nusa Tenggara Barat lainnya. Surat kabar ini disponsori oleh Bank Segara Anak Kencana (BSK), sehingga tetap eksis hingga sekarang. Surat kabar ini sejak tahun 2004 bekerjasama dengan pemerintah melalui koran masuk desa (KMD) namun pada tahun 2008 berhenti.

c. Tera Kota

Sejak didirikan tahun 2008 kendala utama surat kabar Tera Kota adalah permodalan, kurangnya iklan dan pelanggan, sehingga sempat menghilang pada tahun 2010. Minat pelanggan juga masih kurang, disamping minimnya tenaga dan juga sumber daya manusia di bidang pengelolaan, di samping juga manajemen yang masih tidak terarur.

Pada tahun 2013 tera kota muncul kembali dengan tampilan yang baru yaitu berwarna. Di bandingkan pada tahun 2008 hingga 2010 Tera Kota kini hanya beredar di sekitar Lombok Timur saja, sedangkan pada tahun 2008 hingga 2010 beredar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Sejak tahun 2013 hingga kini, Tera Kota bekerja sama dengan pemerintah Lombok Timur dan mendapat perogram koran masuk desa (KMD), yang beredar di SKPD, Kecamatan dan Desa-desanya di Lombok Timur.

Kerjasama dengan pemerintah sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan surat kabar Tera Kota, di mana sangat berpengaruh terhadap pemasukan penghasilan Tera Kota. Tera Kota kini mempunyai percetakan sendiri sehingga tinggal manajemen dan tenaga yang akan komitmen supaya tera kota bisa bersaing dengan surat kabar lainnya terutama surat kabar harian.

d. Surat Kabar Umum Corong Rakyat

Surat kabar umum Corong Rakyat terbit perdana pada bulan Januari tahun 2010, surat kabar ini terbit mingguan. Surat kabar ini tetap eksis dan terbit hingga tahun 2013, namun surat kabar ini mempunyai banyak kendala, diantara kendala itu adalah permodalan, sumber daya manusia yang tidak mampu mengelola surat kabar, akibatnya surat kabar ini tertatih-tatih dalam penerbitan ataupun mencari pendapatan untuk biaya cetak.

Kesejahteraan para wartawan dan penegelolanya juga tidak ada, karena untuk menggaji para wartawan dan

pegawainya tidak bisa dilakukan, karena pendapatan surat kabar ini minim. Surat kabar ini tetap eksis dan bertahan hingga kini karena komitmen dari pendiri surat kabar, sehingga untuk membiayai percetakan masih bisa dilakukan.

e. Surat Kabar Harian Radar Lombok

Berbeda dengan surat kabar mingguan Lombok Timur yang mempunyai banyak kendala terutama kendala permodalan. Lain halnya dengan radar Lombok, surat kabar ini tetap eksis hingga 2013, walaupun kerjasama dengan pemerintah Lombok Timur dihentikan sejak tahun 2013, namun tetap eksis dan berkembang hingga 2013.

Surat kabar harian Radar Lombok berdiri tanggal 9 Februari 2009 yang bertepatan dengan hari pers Nasional. Dengan momen itu surat kabar ini ingin memajukan surat kabar di Lombok Timur dan surat kabar diminati oleh semua kalangan tidak hanya kalangan pejabat saja akan tetapi masyarakat umum. Surat kabar ini tetap eksis hingga tahun 2013, dikarenakan pemasukan iklan yang banyak serta pelanggan yang tersebar di sekitar Pulau Lombok. Tidak hanya iklan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Mataram akan tetapi iklan dari Jakarta juga ada yang masuk. Berbeda dengan surat kabar mingguan yang ada di Lombok Timur sulit sekali menggaet iklan perusahaan besar. Tidak adanya perusahaan besar di Lombok Timur, perusahaan besar hanya terdapat di Mataram, akan tetapi mereka kurang tertarik terhadap surat kabar mingguan untuk memasukkan iklan.

Karena surat kabar Radar Lombok masuk Jawa Post grup dimana saham terbesarnya dari Jawa Post grup sebanyak 75% dan 25% dari pemilik surat kabar yaitu Ismail Husni. Surat kabar ini mempunyai pemasukan terbesar dari periklanan terutama di kota Mataram, sejak putusnya kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lombok Timur pada tahun 2013 tidak ada yang berpengaruh terhadap Radar

Lombok, karena pendapatan dari pemerintah daerah Lombok Timur hanya 10% saja.

Radar Lombok menjalin kerjasama dengan pemerintah Lombok Timur sejak mulai terbit hingga tahun 2013, kerjasama ini bertujuan dalam pencerahan bagi masyarakat terutama masyarakat Lombok Timur, karena pada tahun 2009 masalah besar yang dihadapi daerah Lombok Timur adalah tingginya buta aksara yang mencapai 30% dari jumlah penduduk, selain tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu upaya pemerintah dalam memberantas buta aksara yaitu dengan menyebarkan surat kabar sebagai penyampai informasi dan media pendidikan hingga ke pelosok-pelosok desa. Namun pada tahun 2013 kerjasama itu dihentikan, akan tetapi walaupun kerjasama dengan pemerintah berakhir, radar lombok tetap eksis karena pendapatan dari kerjasama itu hanya 10% saja. Pendapatan terbanyak Radar Lombok adalah dari iklan terutama iklan perusahaan dari Mataram maupun dari luar daerah seperti dari Jakarta.

Walaupun surat kabar itu masih eksis hingga tahun 2013, akan tetapi masih mengalami kendala terutama surat kabar mingguan. Surat kabar mingguan tersebut kadang tidak terbit secara teratur setiap minggu dan juga masih tertatih-tatih dalam pengelolaan maupun penerbitan karena, pendapatan surat kabar yang minim, hanya untuk membiayai percetakan saja.

D. Kesimpulan

Pada masa Orde Baru 1986 hingga Tahun 1998 untuk mendirikan surat kabar harus mengurus izin ke menteri penerangan atau yang disebut surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Ini yang membuat surat kabar di Lombok Timur sulit terbit, dikarenakan pada saat itu biaya untuk mendirikan penerbitan surat kabar sangat mahal dan sulit, sehingga pada masa Pemerintahan Orde Baru, surat kabar di Lombok Timur belum bersifat

komersil, hanya surat kabar yang terbit bulanan atau mingguan yang bersifat milik organisasi yang terbit pada saat itu, yang bertujuan untuk publikasi organisasi itu sendiri. Pada tahun 1986 baru terbit surat kabar Gema Nahdatul Wathan.

Sejak reformasi tahun 1998 berjalan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers setelah Reformasi berjalan, surat kabar mulai berkembang dan bermunculan, akan tetapi surat kabar di Lombok Timur mengalami banyak kendala terutama permodalan, selain itu kurangnya minat baca masyarakat Lombok Timur merupakan salah satu kendalanya. Surat kabar di Lombok Timur sulit sekali berkembang dan bertahan lama, terutama surat kabar mingguan. Surat kabar mingguan yang masih eksis sampai tahun 2013 adalah surat kabar umum Corong Rakyat, Dewi Anjani, Duta Selaparang. Sedangkan surat kabar harian yang masih eksis hingga tahun 2013 adalah surat kabar Radar Lombok.

E. Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Dudung. (2009). *Metodologi Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Alfian, Supriyadi. (2012), *Eksistensi Koran Harian Lokal*, <http://lampungekspres.blogspot.com/2012/10/le-eksistensi-koran-harian-lokal.html>. Diakses 20 Juni 2021.
- Amin, Samsul Munir (2009). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah.
- Ariadi, L. G. (2001). Koran Daerah di Bawah Bayang Penguasa dan Pengusaha Kasus Kebijakan Kemitraan dalam Penerbitan Lombok Post. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 5(1), 54-66.
- Budiyanto, (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas XII*. Jakarta: Erlangga.
- Djarmika, Prija (2004). *Menjadi Penulis Untuk Pencerahan Demokrasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Efendi, A. (2020). *Perkembangan Pers Di Indonesia*. Alprin.

- Efendi, Akhmad. (2010). *Perkembangan Pers di Indonesia*. Semarang: Alprin.
- Habibuddin, (2008). *Pintu Masuk Dunia Jurnalistik*. Pancor: UD. Alvin
- Kusuma, S. (2016). Posisi media cetak di tengah perkembangan media online di Indonesia. *Jurnal InterAct*, 5(1), 56-71.
- Martini, R. (2014). Analisis Peran Dan Fungsi Pers Sebelum dan Sesudah Reformasi Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 13(2), 1-9.
- Penelitian Hidayatullah, A. (2018). Perilaku Jurnalis Dalam Penyelenggaraan Pers Di Bima. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 4(2), 45-68.
- Prasetiani, Christina dan Yohana, Anastasia Fanny. (2011). *Ekologi Media Kompas Edisi Cetak 02 Oktober 2011*.
- Ri'aeni, I., & Sulistiana, W. (2017). Industri Media Massa Lokal dalam Tinjauan Manajemen Media Ideal. *Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 1(1), 265-277
- Rizky, L. (2018). Pemberitaan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2018 Nusa Tenggara Barat Dalam Media Lokal Surat Kabar Suara NTB (Analisis Isi Rubrik Polhukam Pada Surat Kabar Suara NTB). *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soi, M. O. S. (2010). Pers Dalam Pemberitaan Konflik Antarwarga Suku Sasak (Analisis Framing Tentang Pemberitaan Konflik Antarwarga Suku Sasak di Kabupaten Lombok Tengah Dalam SKH Lombok Post Periode 26-30 September 2009 Dan Periode 02 Februari-30 Maret 2010). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Suprihatini, Amin dan Suparyanto, Yudi (2010). *Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Kelas XII*. Mataram: PT Intan Pariwara.
- Syahputra, D. S. (2019). Pers Dan Pemerintah. Waraqat: *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 16-16.
- Vivian, Jhon (2008). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yusuf, Iwan Awaluddin (2011), *Bisnis Surat Kabar, Masihkah Menjanjikan?*, <https://bincangmedia.wordpress.com/2011/10/09/bisnis-surat-kabar-masihkah-menjanjikan/>. Diakses 20 Juni 2021.